

FORMULASI STRATEGI PARTISIPASI PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2019

Yuni Lestari ^{1*}, Agus Prastyawan ², Prasetyo Isbandono ³

Department of Public Administration, Faculty of Social Science and Law,
Universitas Negeri Surabaya. Jalan Ketintang, Surabaya 60231, Indonesia
yunilestari@unesa.ac.id

Abstract

Increasing the quota of women's representation in the political area is a manifestation of the affirmative policy implementation. The policy is one of the government's acceleration actions in realizing gender equality. In order to achieve these objectives, collaboration between the government, political parties, the voting community and women legislative candidates is needed. Political parties should develop a good strategy, so that the quota for women's representation increases. This study uses qualitative methods, researchers describe the work patterns of political parties in the preparation of strategy. The object of research is 15 political parties registered in the 2019 General Election in Surabaya City. The focus of the research focuses on the strategy formulation stage, which includes: (a) development of vision and mission, (b) identification of opportunities and threats, (c) identification of strengths and weaknesses, (d) setting long-term goals, (e) other strategies to achieve objectives, and (f) the existence of alternative strategies. Summary of the results of this study include: (a) most of the visions and missions of political parties have not focused on the theme of gender equality, (b) the lack of public support for women candidates is a threat, (c) most political parties have not recognized the threats to candidates women, (d) the theme of women has not been the main focus in the long-term goals of political parties, and (e) regeneration is an alternative strategy in increasing the quota for women's representation.

Keywords: *strategy management, elections, women's representation, affirmative policies*

Abstrak

Peningkatan kuota keterwakilan perempuan di ranah politik merupakan perwujudan dari implementasi kebijakan afirmatif. Kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah acceleration action pemerintah dalam mewujudkan gender equality. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, masyarakat pemilih, maupun calon legislatif perempuan. Dibutuhkan tahapan penyusunan strategi partisipasi yang apik dari partai politik, sehingga kuota keterwakilan perempuan akan meningkat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, peneliti mencoba mendeskripsikan pola kerja partai politik dalam penyusunan strategi. Adapun objek penelitian adalah 15 partai politik yang terdaftar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Kota

Surabaya. Fokus penelitian menitikberatkan pada tahap penyusunan strategi, yang meliputi: (a) pengembangan visi dan misi, (b) identifikasi peluang dan ancaman, (c) identifikasi kekuatan dan kelemahan, (d) menetapkan tujuan jangka panjang, (e) strategi lain untuk mencapai tujuan, serta (f) adanya strategi alternatif.

Rangkuman hasil penelitian ini, antara lain: (a) sebagian besar visi dan misi partai politik belum berfokus pada tema gender equality, (b) lemahnya dukungan masyarakat terhadap caleg perempuan menjadi ancaman tersendiri, (c) sebagian besar partai politik belum mengenali ancaman bagi caleg perempuan, (d) tema perempuan belum menjadi fokus utama dalam tujuan jangka panjang partai politik, serta (e) kaderisasi menjadi salah satu strategi alternatif dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan.

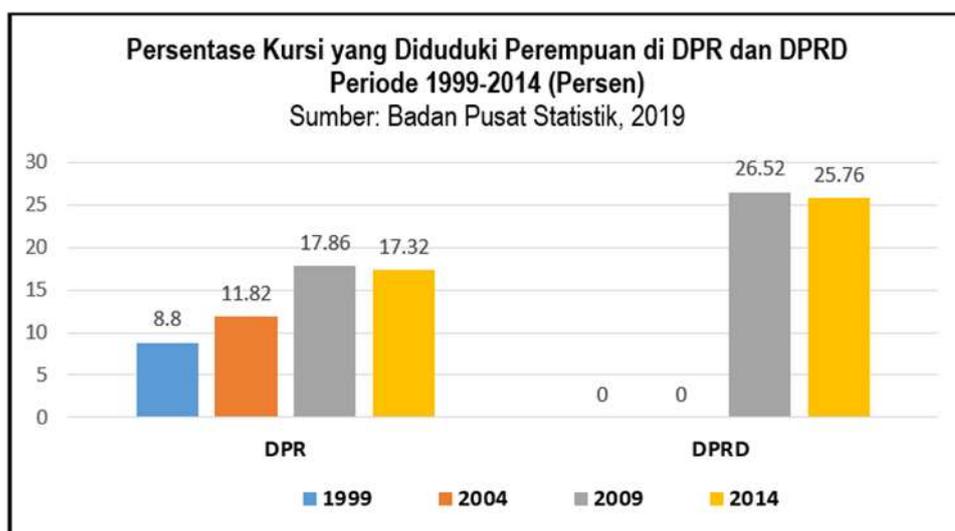
Kata kunci: manajemen strategi, pemilihan umum, keterwakilan perempuan, kebijakan afirmatif

PENDAHULUAN

Perbincangan tentang politik sering kali dimaknai dengan perbincangan yang sangat maskulin. Ranah politik di beberapa tingkat kelembagaan atau kepemimpinan di Indonesia masih sangat dominan dengan laki-laki. Banyak teori ahli lahir dalam rangka menggugat kondisi tersebut, diantaranya sebagaimana diungkap oleh Suprpto dalam Rinawati (2016:388) tentang teori pertentangan kelamin. Teori yang berangkat dari pemikiran Freud tersebut menganggap bahwa kekuasaan tidak dapat dipertahankan tanpa perjuangan. Dalam pemikiran “penis-envy”nya, Freud juga menjadikan teori ini sebagai dasar bagi pergerakan dalam rangka untuk memperoleh hak dan perluasan kekuasaan bagi perempuan.

Perwujudan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan semakin mendekati kondisi yang semakin *urgent*. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik menjadi tujuan keadilan social yang penuh alasan (Dahlerup dalam Rahmatunnisa, 2016:91), antara lain: (1) *the justice argument* (setengah penduduk dunia adalah perempuan); (2) *The experience argument* (perempuan memiliki pengalaman yang berbeda secara biologis dan sosial); (3) *The interest group argument* (kepentingan yang bertentangan, sehingga laki-laki tak dapat mewakili perempuan); dan (4) *Role models* (panutan bagi perempuan lain untuk aktif di ranah politik).

Kebijakan afirmatif tentang kuota 30% keterwakilan perempuan diranah politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 173 ayat (2) bagaikan angin segar bagi perempuan. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu bentuk pengakuan harkat manusia pada perempuan dan laki-laki secara bersama-sama untuk merdeka dan setara. Kebijakan afirmatif dimaknai sebagai kebijakan solutif untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Pada kenyataannya kebijakan afirmatif belum mampu menjadi jawaban solutif atas ketimpangan yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Data berikut ini menjadi bukti dari kondisi masih belum terjawabnya permasalahan implementasi kebijakan afirmasi tersebut.



Gambar 1. Bagan Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD Periode 1999-2014

Jika melihat dari data BPS pada tahun 2019 tersebut maka menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR dari 1999-2014 masih belum memenuhi kuota 30%. Walaupun di tingkat DPRD keterwakilan perempuan sudah menempati prosentase yang lebih tinggi dari DPR, namun belum dapat memenuhi kuota yang disyaratkan.

Gambaran politik terhadap keterwakilan perempuan di atas menjadi bukti dasar bahwa harapan *politic equality* antara laki-laki dan perempuan di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya menjadi PR (pekerjaan

rumah) bagi semua pihak untuk dapat keluar dari kondisi tersebut. Jika kebijakan sebagai salah satu unsur utama dalam mewujudkan telah tersedia, maka yang diperlukan selanjutnya adalah strategi implementasi kebijakan yang tentunya memerlukan telaah yang lebih mendalam. Hal ini sangat jelas membuktikan bahwa kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan masih membutuhkan pemecahan lain yang lebih solutif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni berusaha memahami pemaknaan individu (*subjective meaning*) dari subyek yang ditelitinya. Rumusan masalah diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan mengarah pada upaya untuk memahami faktor-faktor yang berkaitan dengan suatu masalah tersebut (Moleong, 2017:94). Dimana faktor-faktor tersebut terjabar dalam fokus penelitian dan fokus digunakan untuk membatasi studi. Beberapa fokus dalam penelitian merupakan bentuk batasan studi dari pertanyaan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah penelitian.

Dengan berangkat dari teori Manajemen strategi sebagaimana diungkapkan oleh Fred R. David (2017:6), fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan penyusunan strategi partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan dalam pemilu tahun 2019. Fokus tersebut meliputi: (a) pengembangan visi dan misi, (b) identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, (c) kekuatan dan kelemahan internal organisasi, (d) menetapkan tujuan jangka panjang, (e) adanya strategi alternatif, dan (f) adanya strategi tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) (Miles dan Huberman, 2007:15). Teknik analisa data dalam penelitian ini mengadaptasikan analisis Moser. Analisis ini memfokuskan pada peneliti menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijaksanaan program dan proyek yang lebih peka gender (Handayani dan Sugiarti, 2006: 165). Teknik ini mengedepankan pendekatan

terhadap persoalan perempuan, identifikasi terhadap peranan majemuk perempuan, serta identifikasi kebutuhan gender praktis-strategis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemilihan umum 2019, tercatat 16 parpol tergabung dalam pesta demokrasi di Indonesia ini. Sejalan dengan hasil keputusan tersebut, Kota Surabaya melaksanakan pemilu 2019 dengan melibatkan 16 parpol terdaftar secara aktif. Dari hasil data dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) ataupun hasil wawancara diperoleh data jika seluruh parpol tersebut secara serentak telah melaksanakan kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan.

Namun pada kenyataannya, keberadaan kebijakan tersebut dapat dikatakan belum dapat mempresentasikan kesetaraan terpilihnya perempuan di kursi dewan. Keterlibatan minimal 30% perempuan dalam parlemen, nampaknya dijalankan oleh setiap parpol hanya sekedar untuk memenuhi batas minimal. Kualitas dan kompetensi setiap calon legislator perempuan pun tidak lagi menjadi hal yang diutamakan. Pada akhirnya tidak heran jika pada kursi dewan terpilih pun, kuota perempuan tidak melebihi 30%. Kebijakan kuota keterwakilan perempuan yang ada pun hanya berbicara diranah kuota pendaftaran calon dewan dari masing-masing partai politik. Adapun tahapan penyusunan strategi (*strategy formulation*) partisipasi partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi dewan dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

1. Pengembangan Visi dan Misi

Gambaran tentang perencanaan strategi suatu organisasi dapat dilihat dari visi, misi, serta tujuan organisasi tersebut (Raharja, 2016:208). Visi merupakan impian atau keinginan yang ingin diwujudkan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Misi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi berupa cara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Sementara tujuan dikatakan sebagai target yang harus dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari visi dan misi organisasi.

Pemahaman yang jelas memiliki makna jika keberadaan perempuan bukan hanya sebagai pemenuhan syarat minimal semata. Salah satu contoh adalah hasil wawancara dengan salah satu kader partai politik “Demokrat” yang menjelaskan bahwa “Dimana fungsi dari visi dan misinya adalah menjadi partai yang dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, dengan mengedepankan kesetaraan gender”. Dari hasil wawancara tersebut sangat jelas diketahui jika kesetaraan gender juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Hasil penelitian diketahui juga bahwa sebagian besar parpol menyatakan diri jika setiap visi dan misi parpol disusun dengan memperhatikan filosofi dasar partai, kebutuhan atau tujuan partai dengan mempertimbangan perkembangan zaman. Perubahan visi dan misi secara rutin pun dilakukan dengan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Namun ada juga parpol yang tidak menyadari jika visi dan misi parpol belum mengalami perubahan dari masa ke masa.

2. Identifikasi Peluang dan Ancaman Eksternal Organisasi

Analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) merupakan konsep efektif yang dapat digunakan oleh organisasi dalam menstrukturisasikan masalah. Pengenalan akan peluang dan ancaman bagi organisasi akan dapat digunakan sebagai alat peramalan untuk membuat desain strategi organisasi di masa yang akan datang (Kuswoyo, 2018). Dengan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki parpol, maka besar harapannya parpol akan dapat menangkap segala keuntungan dari setiap peluang yang muncul. Dari data tabel diatas diketahui jika proses kaderisasi yang selektif membawa dampak positif yakni diperolehnya kader yang kompeten. Selanjutnya beberapa parpol juga mengungkapkan bahwa pelatihan terhadap kader perempuan menjadi salah satu sumber kekuatan partai. Keberadaan nama besar kader perempuan sebelumnya atau nama besar tokoh parpol juga membawa daya tarik tersendiri bagi parpol untuk menggaet kader khususnya perempuan.

Analisa kelemahan (weeknesses) dapat mendorong parpol untuk menyiapkan upaya mencegah ataupun penanganan terhadap ancaman-ancaman yang sekiranya akan muncul. Pada kenyataannya tidak semua partai dapat melakukan analisa dengan baik terkait dengan kelemahan parpol. Kelemahan parpol pada umumnya terkendala pada kompetisi internal kader parpol dan minimnya kader perempuan yang memiliki kesadaran diri untuk mendaftarkan diri sebagai Caleg. Selain itu, kelemahan lain berasal dari mainset masyarakat bahkan kader yang masih memandang sebelah mata keberadaan perempuan di ranah politik. Rendahnya pengetahuan kader perempuan tentang politik juga menjadi salah satu kelemahan parpol yang memerlukan perhatian tersendiri.

3. Kekuatan dan Kelemahan Internal Organisasi

Dengan modal kekuatan yang dimiliki partai politik, maka akan mempermudah parpol untuk menangkap setiap peluang yang tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi parpol. Coman dalam Subaktilah (2018:108) menjelaskan bahwa analisa SWOT memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mampu mendeteksi setiap kelemahan dan kelebihan sebuah institusi sehingga bermanfaat dalam meminimalisasi dampak atau konsekuensi yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dari hasil penelitian diketahui terdapat faktor-faktor pendukung yang muncul dari luar partai politik yang dapat mejadi peluang bagi parpol untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di ranah politik. Faktor-faktor pendukung tersebut, antara lain: keberadaan wadah atau organisasi-organisasi perempuan yang berkolaborasi dengan parpol, sampai dengan kaderisasi generasi muda dan Caleg yang berada di luar partai dengan mengedepankan kompetensi yang bersangkutan.

Ancaman terbesar yang berasal dari luar parpol adalah dominasi maskulinitas (laki-laki) dan kuatnya budaya patriarkhi masih membayangi dunia perpolitikan di Indonesia. Kendala yang dihadapi oleh bakal Caleg perempuan mulai dari tidak mudahnya mendapatkan ijin dari keluarga dan

kerabat, kuatnya kukungan perempuan dalam area domestik, sampai dengan ketidakmampuan bakal Caleg perempuan secara financial.

4. Adanya Tujuan Jangka Panjang

Pada pembahasan sebelumnya telah disampaikan bahwa visi, misi, serta tujuan organisasi adalah komponen penting yang harus dimiliki organisasi mencapai tujuan utama organisasi. Tujuan jangka panjang (*long-term goals*) dibaratkan sebagai *reward* tertunda yang akan diterima oleh organisasi di masa yang akan datang (Woolley dan Fishbach, 2016:2).

Dari hasil penelitian diperoleh penjelasan jika setiap partai politik telah memiliki tujuan jangka panjang. Peneliti melakukan telaah lebih lanjut tentang adanya tema perempuan disinggung dalam tujuan jangka panjang partai politik. Maka diperoleh hasil jika tidak semua parpol memiliki antusiasme tersendiri terhadap bahasan perempuan dalam tujuan atau rencana jangka panjang partai politik. Pembahasan perempuan hanya muncul sebagai salah satu syarat pemenuhan kebijakan *affirmative* kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik.

5. Adanya Strategi Alternatif

Organisasi dapat mencapai tujuan utama ketika organisasi mempunyai strategi yang *matang* terkait hal tersebut. Selain menentukan strategi utama, hendaknya organisasi menentukan juga strategi penunjang sebagai strategi alternatif. Hal ini mengibaratkan organisasi memiliki banyak jalan (cara) untuk mencapai tujuan (Erika, 2016:174).

Penelitian ini menghasilkan salah satu pernyataan jika strategi alternatif yang telah dilakukan partai politik dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan yakni melakukan kaderisasi parpol melalui wadah-wadah yang telah dibentuk oleh partai politik. Strategi lain yang dapat dilakukan untuk menarik simpati publik antara lain dengan memberikan seminar-seminar tentang perempuan, seperti halnya kesehatan reproduksi perempuan.

6. Adanya Strategi Lainnya

Salah satu strategi alternatif yang digunakan oleh parpol dalam meningkatkan keterwakilan perempuan adalah berkolaborasi dengan anggota keluarga calon legislatif. Hal tersebut berangkat dari pengalaman budaya masyarakat yang masih patriarkhi, parpol beranggapan bahwa restu keluarga terutama bagi calon legislatif perempuan menjadi hal yang sangat penting.

Strategi cadangan lain yang dapat dilakukan oleh parpol adalah dengan melakukan *open recruitment*. Kecenderungan pelaksanaan strategi *open recruitment* ketika parpol tidak mendapatkan kader dari internal parpol yang bersangkutan. Selain itu, peningkatan kompetensi caleg perempuan juga menjadi salah satu strategi yang juga patut untuk diperhitungkan.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat ditarik dari proses *strategy formulation* adalah (a) visi dan misi parpol disusun berdasarkan falsafah teoritik masing-masing parpol, (b) meningkatkan pengetahuan politik dan ketrampilan kader perempuan sebagai solusi atas kelemahan sebagian besar parpol, (c) parpol terlihat rancu membedakan antar kekuatan dan peluang ataupun kelemahan dan ancaman, (d) tema perempuan belum menjadi agenda tersendiri bagi parpol dalam menentukan tujuan jangka panjang, (e) kaderisasi melalui wadah perempuan parpol menjadi strategi alternatif dalam meningkatkan peran perempuan dalam partai politik, serta (f) strategi alternatif lainnya adalah melalui perekrutan kader parpol yang dilaksanakan secara terbuka.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2019. "Prosentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dan DPRD 1999, 2004, 2009, 2014" Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019 dari alamat surel: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/06/05/1427/persentase-kursi-yang-diduduki-perempuan-di-dpr-dan-dprd-1999-2004-2009-2014.html>
- David, Fred R. 2017. "*Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*". Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Erika. 2016. "Formulasi Strategi Pengembangan dan Penguatan Kluster Industri (Studi Kasus: Industri TPT Kaos Surapati)". *Jurnal PASTI*. 10(02):161-176.

Diunduh pada tanggal 20 November 2019 dari alamat surel
<http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/pasti/article/view/1586/1222>

- Handayani, Trisakti dan Sugiarto. 2006. “*Konsep dan Teknik Penelitian Gender*” (Edisi Revisi). UMM Press. Malang
- Kuswoyo, Ferry. 2018. “Analisis Strategi Bisnis Dengan SWOT pada Ana Fashion”. *Journal of Management*. 4(4). Diunduh pada tanggal 20 November 2019 dari alamat surel <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/MS/article/view/1119/1092>
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 2007. “*Analisis Data Kualitatif*” (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru). UI-Press. Jakarta
- Raharja, Sam'un Jaja. 2016. “Formulation of Startegic Planning Base on Environment: Studies in Five Organizations”. *Jurnal AdBisprenuer*. 1(3):207-219.
- Rahmatunnisa, Mudiwati. 2016. “Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”. *Jurnal Wacana Politik*. 1(2):90-95. Diunduh pada tanggal 27 Maret 2019 dari alamat surel <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/download/11049/pdf>
- Rinawati, Rini. 2004. “Kajian Gender mengenai Partisipasi Wanita dalam Pembangunan Partisipatif melalui Pemberdayaan Masyarakat”. *Mimbar Vol. XX No. 3 Juli-September 2004*: 387-405. Diunduh pada tanggal 26 Maret 2019 dari alamat surel: <https://media.neliti.com/media/publications/157253-ID-partisipasi-wanita-dalam-pembangunan.pdf>
- Subaktilah, Yani. 2018. “Analisis SWOT: Faktor Internal dan Eksternal pada Pengembangan Usaha Gula Merah Tebu (Studi Kasus di UKM Bumi Asih, Kabupaten Bondowoso)”. *Jurnal Agroteknologi*. 12(02):107-115. Diunduh pada tanggal 20 November 2019 dari alamat surel <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAGT/article/download/9276/6203/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Woolley, Kaitlin and Fishbach, Ayelet. 2016. “Immediate Reward Predict Adherence to Long-Term Goals”. *Personality and Social Psychology Bulletin*. Hal. 1-12. Diunduh pada tanggal 20 November 2019 dari alamat surel <https://faculty.chicagobooth.edu/ayelet.fishbach/research/Woolley&FishbachPSPB.pdf>